



Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Wakil Gubernur Lemhannas RI

Letnan Jenderal TNI Moeldoko melaksanakan serah terima jabatan kepada Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi sebagai Wakil Gubernur Lemhannas RI pada hari Senin (4/2). Upacara serah terima jabatan dan pelantikan Wakil Gubernur tersebut di pimpin langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA di Gd. Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, Jakarta.

Pergantian pejabat Wakil Gubernur Lemhannas RI ini merupakan salah satu bagian dari dinamika yang berkembang di dalam upaya pencapaian Lemhannas RI menuju *World Class Institution*. Selain mampu dan cakap dalam bidang manajerial, Wakil Gubernur juga dituntut mampu menjadi motor penggerak dalam membangun budaya kerja, menumbuhkan rasa bangga pada institusi kepada seluruh personel serta mampu mensinergikan seluruh potensi yang dimiliki agar optimalisasi kinerja Lemhannas RI sesuai dengan apa yang diharapkan.

Harapan Gubernur Lemhannas RI kepada Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi sebagai Wakil Gubernur yang baru agar dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan tuntutan tugas dan selanjutnya bersama-sama dengan personel Lemhannas RI lainnya berupaya untuk mencapai Lemhannas RI sebagai lembaga berkelas dunia.

Gubernur Lemhannas juga tidak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Letnan



Jenderal TNI Moeldoko yang selama pengabdianya di Lemhannas RI telah banyak memberikan dukungan kepada Gubernur Lemhannas RI dalam menata, menggerakkan dan mengontrol jalannya roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai koridor yang benar.

Disamping itu, besar pula harapan Gubernur Lemhannas RI kepada seluruh pejabat dan personel Lemhannas RI untuk bersama-sama mendukung penuh kepada setiap pejabat yang baru sehingga segala sesuatu yang selama ini telah berjalan akan semakin baik.

Hadir dalam upacara serah terima jabatan dan pelantikan tersebut, Sekretaris Dewan pengarah, Sekretaris Utama, para Deputi, Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji, Tenaga

Profesional, Pejabat Struktural, Ketua dan segenap Pengurus Perista Lemhannas RI serta undangan lainnya.



Foto : Humas Lemhannas

Redaksi :

Pengarah :

Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc.

Penanggung Jawab :

Brigjen TNI Sahat Aritonang.

Redaktur :

Megawarni Simamora, S.E, M.M.

Penyunting/Editor :

Letskaj G.T. Situmorang.

Redaktur Pelaksana :

Bambang Iman Aryanto, S.T., Trias Noverdi, S.S., Endah Heliana, S.Sos.

Desain Grafis & Fotografer :

Arianto S.H., Sertu Syafrizal.

Sekretariat :

Linda Purnamasari S.Sos., Gatot, Indah Winarni.

Distribusi :

Letskaj Inf. Sumurung,, Lettu Cba Supriyono, Suryadi.

Alamat Redaksi :

*Biro Humas Settama Lemhannas RI,
Jl.Medan Merdeka Selatan No. 10
Jakarta Pusat, 10110, Telp. (021)
3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,
Website <http://www.lemhannas.go.id>*

Daftar Isi:

- 1 Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Wakil Gubernur Lemhannas RI**
- 3 Transformasi Nilai Luhur dalam Berbangsa dan Bernegara**
- 4 Pentingnya Keterpaduan Pengelolaan Air guna Mendukung Ketahanan Nasional**
- 5 PPRA Membentuk Watak dan Karakter Kepemimpinan Berwawasan Kebangsaan dan Visioner**
- 6 Waspada! Penggunaan Identitas sebagai Pemicu konflik**
- 7 Lemhannas RI Perkuat Kerja Sama dengan Royal Thai Armed Forces**
- 8 5 (Lima) Agenda dalam RDP Komisi I DPR RI**
- 9 Pemahaman Nilai Kebangsaan, Prasyarat Mutlak bagi Kehidupan Nasional**
- 11 Daerah, Perlukan Legislasi Kebijakan yang Kuat**
- 12 Reformasi Birokrasi Butuh Pemahaman Wawasan Kebangsaan**

Transformasi Nilai Luhur dalam Berbangsa dan Bernegara

Jum'at (1/2), bertempat di Gedung Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI menyelenggarakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1434 Hijrah yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.

Melihat kondisi saat ini, harus diakui bahwa dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah menunjukkan pergeseran orientasi jati diri dan semakin tergerusnya nilai-nilai moralitas.

Sebagai umat muslim yang beriman dan bertaqwa, kita patut memperingati Hari Lahirnya Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan momentum yang sangat baik untuk menggali makna dan hikmah serta introspeksi diri sudah sejauh mana kita meneladani sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Acara yang menghadirkan penceramah Ir. H. Sofyan Harahap tersebut, mengangkat tema "Jadikan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai Transformasi Nilai-nilai Luhur dalam Berbangsa dan Bernegara".

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa dalam kondisi kehidupan bermasyarakat seperti saat ini, sangat dibutuhkan transformasi nilai-nilai luhur.

"...kita sangat membutuhkan transformasi nilai-nilai, yang dapat menghantarkan pada perbaikan akhlak, kesalehan hidup, toleransi terhadap perbedaan, kesetaraan umat manusia dan kecintaan kepada tanah air, bangsa serta negara." jelas Gubernur Lemhannas RI.

Hadir dalam acara tersebut para pejabat struktural Lemhannas RI, Sekjen IKAL, tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji, Tenaga Profesional, Pengurus Perista Lemhannas RI dan segenap anggota Lemhannas RI.



Pentingnya Keterpaduan Pengelolaan Air guna Mendukung Ketahanan Nasional



Foto : Humas Lemhannas

Pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber kehidupan bagi manusia perlu dikelola secara terpadu untuk menghindari timbulnya berbagai macam konflik dan bencana sosial. Pentingnya keterpaduan pengelolaan air ini disampaikan dalam acara presentasi hasil kajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di ruang rapat kantor Menteri Koordinator Perekonomian RI, di Jakarta, Selasa (5/2). Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai follow up hasil pengkajian Deputi Pengkajian Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI pada tahun 2012.

Menurut pemapar Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA, tanpa pengelolaan yang baik, pemanfaatan air dapat mengakibatkan berbagai konflik. Dikatakan, konflik dapat terjadi antar kawasan, sosial dan budaya, antar instansi, antarpemangku kepentingan dan dapat terjadi hampir di semua negara.

"Indonesia memiliki potensi demografi yang besar yakni jumlah penduduk yang besar, tentunya potensi tersebut juga memiliki dampak akan besarnya kebutuhan air, termasuk kegiatan industri dan pertanian. Kekurangan atau kelebihan air misalnya, tidak hanya akan menjadi bencana, tapi juga berdampak pada bencana sosial," kata Dadan Umar.

Terkait dengan hal itu, Lemhannas RI memberikan rekomendasi dalam tata kelola air di Indonesia, yaitu perubahan *mindset*/persepsi bahwa air merupakan sumber daya alam tak terbarukan, dan perlu dikelola secara maksimal, sinergitas kelembagaan, pembuatan *grand system management* air nasional, serta sinkronisasi kebijakan dan regulasi. Dalam diskusi mengemuka bahwa banyak permasalahan yang terjadi karena tidak sinergisnya kebijakan antara pusat dan daerah. Para peserta diskusi berharap akan ada pertemuan dan diskusi lanjutan usai diskusi ini.

Paparan tersebut dihadiri para pejabat teras Kementerian Perkonomian RI, Bappenas RI, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Pekerjaan Umum RI. Hadir pula pejabat Kementerian Kehutanan RI, Kementerian Lingkungan Hidup RI, Kementerian Pertanian RI, Kementerian ESDM, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), BPPSPAM serta Dewan Sumber Daya Air Nasional. Dari lingkungan Lemhannas RI hadir Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Iptek Ir. Kurdinanto Sarah, M.SP, Karo Humas Brigjen TNI Sahat Aritonang dan Dirjian Sosbud Brigjen Pol Drs. Cosmas Lembang.

PPRA Membentuk Watak dan Karakter Kepemimpinan Nasional Berwawasan Kebangsaan dan Visioner



Foto : Humas Lemhannas

"...peserta PPRA XLIX ini nantinya akan lebih siap sebagai pimpinan tingkat nasional yang berkarakter Negarawan, berwawasan Nasional, Regional, dan Global"

Harapan tersebut diungkapkan oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA saat memberikan sambutannya dalam Upacara Pembukaan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX pada hari Selasa (5/2), di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI. PPRA XLIX ini merupakan salah satu dari dua angkatan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI pada tahun ini.

Program Pendidikan Reguler tahun ini telah mengalami perubahan kurikulum menjadi lebih singkat, yang semula 9 bulan menjadi 7,5 bulan.

Mekanisme dan proses penyelenggaraan pendidikan terdiri dari tahap pembelajaran jarak jauh (*e-Learning / off Campus*) selama 1,5 bulan dan *on Campus* selama 6 bulan yang menuntut para peserta dapat membentuk budaya kerjasama dan menyelaraskan keragaman.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, Peserta yang telah diseleksi oleh Lemhannas RI bersama Kemen PAN & RB RI, Kemenhan RI, Mabes TNI, Mabes Polri, BKN, dan BIN memiliki keragaman latar belakang profesi, disiplin ilmu dan pengalaman baik peserta dari kalangan birokrat pusat dan daerah, TNI, Polri, Akademisi dan Organisasi Masyarakat

ataupun peserta dari negara sahabat seperti Srilanka, Pakistan, Yordania, Thailand, Timor Leste, Zimbabwe dan Malaysia .

"...diharapkan hal ini mampu mendinamisasikan proses pendidikan yang dirancang untuk menghasilkan dan membentuk watak dan karakter kepemimpinan nasional yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dan visioner," lanjut Gubernur Lemhannas RI.

Dalam pendidikan ini para peserta akan disiapkan dan dimantapkan sebagai kader pemimpin-pemimpin nasional masa depan yang berkarakter Negarawan, memiliki pengetahuan dan wawasan strategis serta terampil dalam pemecahan masalah-masalah strategis dalam lingkup global, regional dan nasional. Selain itu, para peserta dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran, moralitas dan etika akademik dalam penyelesaian berbagai kewajiban maupun penugasan yang diberikan.

Selain dihadiri oleh para Pejabat Struktural, Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji dan Tenaga Profesional Lemhannas RI, upacara pembukaan ini juga dihadiri Ketua KONI Tono Suratman, perwakilan dari Kedutaan Besar dari negara asal peserta asing, para pejabat dari Kementerian, TNI, Polri dan instansi asal peserta dan undangan lainnya.

Waspada! Penggunaan Identitas sebagai Pemicu Konflik

"Pemerintah harus menaruh perhatian serius terhadap gap yang terjadi dalam masyarakat. Kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin harus dipersempit untuk menanggulangi potensi konflik. Permasalahan ekonomi, dapat menjadi akar konflik di Indonesia dengan dibungkus identitas suku, agama, dan ras," kata Imam B. Prasodjo, Sosiolog dari Universitas Indonesia dalam *Coffee Morning* Gubernur Lemhannas RI dengan Pimpinan Media Massa bertema "Konflik Komunal dan Solusinya" di Gedung Trigatra Lemhannas RI, Kamis (7/2).

Penanganan konflik yang ada saat ini di tahun 2013 tentunya berbeda dengan konflik yang terjadi pada tahun 1965, dan Indonesia memiliki 'glossary' konflik yang lengkap untuk menjadi acuan kita semua menanggulangi konflik ke depan. Menurut Imam B.

Prasodjo, potensi konflik komunal akan semakin meningkat ketika semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan terbentuknya kantong-kantong masyarakat yang mengakibatkan segregasi.

Ia menambahkan, segregasi itu juga bisa disebabkan oleh kebijakan transmigrasi yang tidak membuat masyarakat membaur. Di daerah transmigrasi justru terbentuk komunitas-komunitas berdasarkan daerah asal. Tanpa disadari hal itu menyimpan konflik yang bisa pecah kapan saja. "Untuk itu, diperlukan kebijakan pemerintah untuk membuat sebuah proyek yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat, agar prasangka yang timbul dalam masyarakat dapat berkurang," kata Imam.

Menanggapi hal tersebut,

Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA mengatakan, meski keamanan menjadi salah satu bidang yang menjadi kewenangan pusat, tetapi ada konteks kedaerahan dalam setiap konflik yang harus dipahami oleh setiap pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memahami fungsinya dalam hal pembinaan masyarakat, teritorial, dan berbagai upaya persuasif.

Indonesia memiliki masyarakat dengan identitas beragam, baik dari agama, suku, maupun ras. "Dalam rangka ke-bhinneka tunggal ika-an, di dalam masyarakat tidak hanya semata mengembangkan keragaman, tapi juga *energetic engagement inter-comunity*, dimana masyarakat mampu bekerja sama dan memahami perbedaan di antara mereka," kata Imam B. Prasodjo.



Lemhannas RI Perkuat Kerja Sama Dengan Royal Thai Armed Forces



Pada Senin (11/2), Gubernur Lemhannas RI menerima kunjungan kehormatan (*courtesy call*) dari the Royal Thai Armed Forces yang dipimpin oleh General Chusak Meksuwan di Ruang Tamu Pimpinan. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Tenaga Profesional Bidang Diplomasi/Hubungan Internasional Marsda TNI (Purn.) Surya Dharma, S.I.P., Tenaga Profesional Bidang Hubungan Internasional Ir. Timotius D. Harsono, M.Sc. dan Kepala Biro Kerja Sama Settama Lemhannas RI Laksma TNI Sulistiyanto, M.Sc.

Setelah *courtesy call* dilaksanakan tukar-menukar cenderamata antara Gubernur Lemhannas RI dan General Chusak Meksuwan yang dilanjutkan dengan foto bersama.

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara the Royal Thai Armed Forces dengan Lemhannas RI di Ruang Rapat Nusantara I Lemhannas RI. Pejabat Lemhannas RI yang mengikuti diskusi tersebut antara lain Marsda TNI (Purn.) Surya Dharma, S.I.P. yang bertindak selaku moderator, Ir.

Timotius D. Harsono, M.Sc., Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Dr. Panutan Sakti, Laksma TNI Sulistiyanto, M.Sc. dan Kepala Biro Humas Brigjen TNI Sahat Aritonang.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pimpinan rombongan the Royal Thai Armed Forces, tujuan utama dari kunjungan tersebut di antaranya adalah untuk menjalin kerja sama akademik (*academic networking*) dengan lembaga penting dan strategis seperti Lemhannas RI.

Pada kesempatan itu juga disampaikan tentang Seminar dan *Workshop* yang akan diselenggarakan oleh the Royal Thai Armed Forces pada bulan Maret 2012 di Thailand mengenai Perubahan Iklim dan Implikasinya terhadap Keamanan.

Saat ini terdapat 1 (satu) orang peserta dari Thailand yaitu Colonel Tanawat Rodchue yang tengah mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX di Lemhannas RI.



Foto : Humas Lemhannas

5 (Lima) Agenda dalam RDP Komisi I DPR RI

Memenuhi undangan komisi I DPR RI, Hari Senin (11/2) Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. budi Susilo Soepandji DEA menghadiri Rapat Dengar pendapat (RDP) di Ruang Nusantara, Gedung DPR RI, Jakarta.

RDP yang di selenggarakan ini membahas program kegiatan Lemhannas RI, baik yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran (TA) 2011, 2012 maupun yang akan dilaksanakan pada tahun 2013.

Dalam penjelasan Gubernur Lemhannas RI, disampaikan 5 (lima) hal dalam RDP tersebut, yaitu **pertama**, evaluasi kinerja Lemhannas RI TA. 2012; **kedua**, realisasi anggaran Lemhannas RI Tahun 2012; **ketiga**, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Lemhannas RI TA. 2012; **keempat**, tindak lanjut hasil temuan BPK RI terhadap Laporan Realisasi Keuangan Lemhannas RI TA. 2011; **kelima**, rencana program kerja Lemhannas RI TA. 2013.

Terkait dengan evaluasi kinerja 2012, Lemhannas RI telah menindaklanjuti rekomendasi dari Kemen PAN RB tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2011.

"...Lemhannas telah menyiapkan konsep validasi organisasi demi terwujudnya organisasi yang mendukung tercapainya tujuan Lemhannas RI sebagai Lembaga berkelas dunia (world class institution) dalam hal struktur yang makin efektif, efisien, rasional, proporsional dan transparan," jelas Gubernur Lemhannas RI.

Dalam hal realisasi anggaran Lemhannas RI TA 2012, penyerapan anggaran mencapai 93,09 %. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 90,27%.

Selanjutnya, disampaikan pula terkait dengan pemeriksaan BPK terhadap realisasi anggaran Lemhannas RI TA. 2012 yang akan selesai pada 19 Maret 2013 mendatang. Sedangkan terhadap hasil pemeriksaan BPK terhadap realisasi anggaran Lemhannas RI TA. 2011, telah ditindaklanjuti dengan baik.

Lemhannas RI sendiri pada TA. 2013 mengalami kenaikan Pagu Anggaran sebesar 21, 73 % dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, efisiensi anggaran akan tetap dilakukan yang hasilnya akan mendukung peningkatan sasaran pemantapan wawasan kebangsaan kepada kader partai politik, pengusaha dan unsur media.

"Semakin meningkatnya suhu politik nasional terkait pelaksanaan Pemilu 2014 yang dapat menjadi potensi ancaman terganggunya stabilitas nasional, berdasarkan studi Lemhannas RI, disimpulkan bahwa beberapa entitas yang berpengaruh besar seperti kader partai politik, pengusaha dan unsur media, dipandang perlu mendapat masukan mengenai wawasan kebangsaan agar berorientasi kepada kepentingan nasional," jelas Gubernur Lemhannas RI

Dalam RDP ini, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, dan beberapa pejabat eselon II lainnya.

Pemahaman Nilai Kebangsaan, Prasyarat Mutlak bagi Kehidupan Nasional

Besar harapan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA terhadap peserta Program pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) VII Lemhannas RI yang resmi dibuka pada hari Selasa, (12/2) di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI.

Kegiatan pemantapan yang akan berlangsung selama 2,5 bulan ini merupakan pengganti kegiatan Forum Konsolidasi yang hanya berlangsung selama 5 minggu. Dengan adanya perubahan kurikulum, maka sasaran yang diharapkan akan lebih optimal dan maksimal pencapaiannya.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, sebagai pengemban amanat dan kepercayaan dari rakyat diperlukan sikap dan cakrawala pandang seorang pemimpin yang Negarawan agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan kelompok dan golongan dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

"...ini harus dipahami dan disadari oleh para peserta sekalian, mengingat peran penting saudara-saudara sebagai pimpinan di daerah yang dipercaya rakyat untuk

membangun kehidupan yang demokratis, berbudaya, beretika, bermartabat dan mensejahterakan kehidupan mereka, termasuk rasa aman", lanjutnya lagi.

Kegiatan pemantapan ini bertujuan untuk memperkuat karakter dan pondasi wawasan kebangsaan peserta sebagai pimpinan di daerah dalam melaksanakan kepercayaan rakyat dan agar implementasi otonomi daerah dapat menghadirkan kesejahteraan dan keamanan rakyat di daerah.

Berpikir holistik, komprehensif integral, antisipatif, kooperatif dan sinergik terhadap kepentingan rakyat merupakan harapan yang disandarkan Gubernur Lemhannas kepada peserta pemantapan ini. Selain itu, kepedulian terhadap pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah dengan cerdas dan berkelanjutan, komitmen terhadap kelangsungan pembangunan nasional yang dapat menjamin ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat juga sangat dibutuhkan.





Rabu, (13/2), Menteri Pertahanan Spanyol, H.E. D. Pedro Morenes Eulate bersama Duta Besar Spanyol untuk Indonesia H.E. Rafael Conde de Saro beserta rombongan melakukan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Lemhannas RI. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA. Acara kunjungan kehormatan tersebut dilanjutkan dengan diskusi yang bertempat di Ruang Rapat Nusantara I, Gedung Trigatra Lemhannas RI.

Foto : Humas Lemhannas



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji DEA, menerima audiensi dari Pembantu Rektor Prof. Dr. Sukisno S. Riyadi, SE, M.Si, Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Masyarakat Universitas Mulawarman Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, SH. M.Hum beserta jajarannya, pada hari Rabu, (13/2) di Ruang Tamu Pimpinan, Lemhannas RI, Jakarta.

Foto : Humas Lemhannas

Daerah Perlukan Legislasi Kebijakan Yang Kuat



Foto : Humas Lemhannas

Senin (18/2), Lemhannas RI menyelenggarakan Upacara Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) Angkatan XXXIII di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Deputi, Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji, dan Tenaga Profesional. Selain itu pula hadir pejabat perwakilan Adeksi beserta jajarannya.

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang berlangsung selama sepekan ini, harus dapat dijadikan sebagai momentum guna merefleksikan sejauh mana kualitas wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur yang telah dimiliki. "Kebijakan Penanganan Konflik di Daerah" merupakan tema yang diangkat dalam program pemantapan tersebut.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, tema yang diangkat masih relevan mengingat perlunya penjabaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Komunal ke dalam Peraturan Daerah.

"...maraknya konflik yang terjadi di daerah memerlukan legislasi berupa kebijakan yang kuat sebagai landasan

hukum untuk dipedomani secara baik oleh setiap orang," tegasnya lagi.

Dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan demokrasi yang sehat, beretika dan bermartabat serta berpedoman pada esensi pemikiran cerdas, Lemhannas RI memandang bahwa pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang diselenggarakan ini menjadi hal penting dan perlu diberikan kepada seluruh komponen bangsa, terutama kepada para wakil rakyat yang mengemban amanat besar untuk meningkatkan taraf hidup dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Gubernur Lemhannas RI berharap kegiatan yang diikuti oleh 85 orang wakil rakyat dari daerah ini dapat menjadi wadah tukar pikiran dan pengalaman guna memperluas jejaring kerja antar peserta dalam rangka mensinergikan proses pembangunan di daerah masing-masing.

Selain itu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransformasikan diri sebagai wakil rakyat di daerah yang senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyat dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Reformasi Birokrasi Butuh Pemahaman Wawasan Kebangsaan



Foto : Humas Lemhannas

"Penataan kembali birokrasi pemerintahan bertujuan agar birokrasi pemerintah lebih efisien, efektif dan produktif guna peningkatan layanan publik yang lebih baik dan perubahan tata kelola pemerintahan menuju *good governance*."

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Ir. Azwar Abubakar saat membacakan *Keynote Speech*-nya dalam Seminar Nasional Dalam Rangka HUT Ke-41 KORPRI dengan tema "Membangun Birokrasi Kelas Dunia Yang Berwawasan Kebangsaan" pada hari Rabu (22/2) di Gedung Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI.

Lebih lanjut, terkait dengan wawasan kebangsaan, ia mengatakan bahwa dalam proses penataan birokrasi pemerintah/reformasi birokrasi terutama terkait dengan penataan manajemen SDM aparatur harus didasarkan pemahaman wawasan kebangsaan yang kuat.

Sedangkan, Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir Budi Susilo Soepandji, DEA sebagai *keynote speaker* kedua, mengatakan seminar nasional ini bertujuan untuk membahas secara komprehensif tentang konsep pendayagunaan aparatur negara dan percepatan reformasi birokrasi.

Dalam seminar yang berlangsung hingga tengah hari ini, menghadirkan narasumber lain yang berkompeten seperti Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Indonesia bidang Kebudayaan Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch., Ph.D. yang mengangkat topik "Diplomasi Budaya dan Ketahanan Bangsa", dan Guru Besar ITB Prof. Jann Hidayat Tjakraatmadja yang mengambil topik "Birokrasi Kelas Dunia dalam Koridor MP3EI"

Di sela-sela Seminar Nasional ini juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dengan Dewan Pengurus KORPRI Nasional dalam hal penguatan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Seminar yang terselenggara atas kerjasama Dewan Pengurus Korpri nasional dan Lemhannas RI ini dihadiri oleh Dewan Pengurus Korpri Kementerian/LPNK/BUMN, Dewan Pengurus Korpri Provinsi dan Kabupaten/Kota, Asosiasi Sekda Seluruh Indonesia (Forsesdasi) dan undangan lainnya



Foto : Humas Lemhannas